

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Covid 19 yang berasal dari Kota Wuhan, Negara Cina ini ditemukan pada akhir tahun 2019. Virus ini menyebabkan penyakit pada saluran pernapasan. Penyakit yang disebabkan oleh virus Covid 19 ini menyebar secara cepat. *World Health Organization* (WHO) pada tanggal 12 Maret 2020 menetapkan bahwa fenomena penyebaran virus Covid 19 ini menjadi pandemi (Siemaszko, C.: 2020). Pemerintah berupaya dalam mengatasi penyebaran Covid 19 yang semakin luas. Negara – Negara besar yang terkena dampak dari adanya Covid 19 ini mengalami berbagai permasalahan, mulai dari sector ekonomi, pemerintahan, social hingga kesehatan itu sendiri. Indonesia menjadi salah satu dari banyaknya Negara yang terkena dampak dari Covid 19 saat ini. Pemerintah Indonesia berupaya dalam mengurangi penyebaran virus Covid 19 yang semakin marak terjadi. Pemerintah dengan ini melakukan upaya untuk mengurangi dengan mengambil beberapa kebijakan untuk mengurangi penyebaran yang semakin luas. Ini tertera dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB. Peraturan pemerintah yang sudah dimulai atau disahkan pada 31 Maret 2020 ini menjadi salah satu tindakan pemerintah dalam menangani adanya penyebaran Covid 19 ([covid19.go.id/regulasi](https://www.covid19.go.id/regulasi)).

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah diantaranya ialah dengan mengambil kebijakan yang dimana melakukan pembatasan terhadap mobilitas masyarakat umum. Ini ditunjukkan untuk mengurangi penyebaran yang begitu cepat serta agar tidak terjadi penambahan yang tinggi. Selain melakukan pembatasan mobilitas masyarakat, pemerintah bekerja sama dengan Kementrian Kesehatan dengan melakukan tindak untuk mengambil kebijakan seperti 5M. 5M ini di gencarkan untuk menekan angka

penyebaran Covid 19 yang begitu tinggi. Pertama mengurangi mobilitas di masyarakat, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan memakai masker agar dapat terjaga dari Covid 19 (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2021). Selain mengencarkan 5M sendiri pemerintah mengambil kebijakan seperti Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang di tunjukkan kepada masyarakat agar tidak terpapar adanya Covid 19. Ini sesuai peraturan Pemerintah Pusat tentang PPKM Nomor 24 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (covid19.go.id_regulasi, 2021). Kebijakan yang diambil pemerintah ini dilakukan secara bersama, sehingga mulai dari Pemerintah Pusat hingga Pemerintah daerah melakukan kebijakan tersebut. Akan tetapi bukan hanya peran pemerintah saja yang saat ini diharapkan, melainkan peran serta dukungan dari masyarakat sendiri yang diperlukan saat ini. Ini bertujuan agar kebijakan yang telah diambil dapat berjalan dengan baik. Praktik serta komunikasi dari pemerintah kepada masyarakat sangat difokuskan guna mengurangi adanya berita-berita yang tidak diinginkan. (covid19.go.id).

Pelonjakan yang begitu tinggi membuat akan penyebaran Covid 19 di Indonesia begitu tinggi. Terdapat sekitar 4.216.728 juta jiwa yang saat ini terkonfirmasi Covid 19. Kasus meninggal yang mencapai 142.026 ribu jiwa. Ini hasil dari rentan bulan Maret 2020 hingga Akhir bulan September (Covid 19.go.id). Sehingga dapat dilihat bahwa masyarakat yang terdampak Covid 19 begitu tinggi, serta kasus pelonjakan yang sangat tinggi terjadi di rentan bulan Mei hingga Agustus 2021, pelonjakan yang mencapai angka 348 % dari kasus bulan sebelumnya (Binti Mufarida_iNews.id). Ini mengakibatkan bahwa sector kesehatan terdampak dari adanya pasien yang terus menerus bertambah, ini mengakibatkan terdapat beberapa rumah sakit dan pelayanan

kesehatan yang penuh sehingga tidak dapat menampung masyarakat yang terkonfirmasi kasus Covid 19.

Pemerintah Pusat dalam mengurangi adanya kasus Covid 19 maka mengambil kebijakan-kebijakan dimana untuk mengurangi pelonjakan yang semakin tinggi. Upaya yang dilakukan selain melakukan protocol kesehatan guna menurunkan angka yang begitu tinggi ialah dengan dilaksanakannya perlindungan secara khusus yaitu dengan pemberian vaksinasi. Selama bertahun-tahun vaksin terbukti dapat menurunkan kejadian penyakit menular melalui mekanisme imunitas tubuh manusia (Mortellaro & RicciardiCastagnoli, 2011). Melihat dari program vaksin yang dilakukan memang terdapat efek samping yang biasanya terjadi, ini seperti demam, panas yang tinggi dan badan pegal – pegal. Selain efek samping yang terjadi, pemberian program vaksin ini memiliki manfaat yang baik untuk tubuh, terdapat beberapa manfaat dengan adanya vaksinasi diantaranya membantu menciptakan herd immunity, membangun perlindungan tubuh, memperoleh kekebalan tubuh, menurunkan sakit parah setelah terdampak Covid 19 (Kompas.com). Program Vaksin Covid 19 dikembangkan untuk membantu pembentukan imunitas tubuh individu sehingga pemberian vaksin Covid 19, hal ini diharapkan dapat mempercepat terbentuknya kekebalan kelompok (herd immunity) yang nantinya berdampak pada penurunan jumlah kasus yang terinfeksi (World Health Organization, 2020a). Vaksin sendiri memiliki tujuan untuk membentuk anti body kepada tubuh agar tubuh dapat kebal akan virus yang masuk ke dalam badan.

Program Vaksinasi ini sendiri di Indonesia dimulai pada awal tahun 2021. Hal ini dilakukan guna memberikan anti body bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat usia tua dan juga para pekerja, atau bisa dikatakan usia – usia produktif. Ini dilakukan karena pemerintah ingin mengurangi angka penyebaran serta ingin memperbaiki sector-sektor yang sedang turun seperti ekonomi, pendidikan dan juga social. Proses

program vaksinasi Covid 19 yang dilakukan di tunjukkan kepada masyarakat luas. Program ini dilaksanakan sebagai salah satu tindakan untuk mengurangi angka Covid 19 yang tinggi. Program vaksinasi Covid 19 ini terbagi menjadi dua gelombang di awal. Gelombang pertama diberikan ke tenaga kesehatan, petugas public dan lansia. Yang dimana mereka lebih rentan terkena Covid 19, karena aktifitas dan daya tahan tubuh yang terbilang tidak kuat. Lalu di gelombang kedua program vaksinasi ini, sasaran yang ingin ditunjukkan ialah kepada masyarakat dan juga tenaga pendidik yang nantinya bekerja secara tatap muka dan berada dalam kelompok (Kemenkes RI, 2021).

Melihat dari awal masuknya vaksin di Indonesia, masyarakat sudah melakukan vaksinasi hampir mencapai 45.12% dari jumlah yang ditentukan atau target yang diinginkan di dosis 1 pemberian vaksin bagi masyarakat dan tenaga medis. Lalu untuk dosis 2 nya sendiri baru di angka 25.34% dari jumlah masyarakat yang telah melakukan dosis 1 (vaksin.kemkes.go.id). Ini membuktikan bahwa masyarakat masih belum semua mendapatkan vaksin secara merata. Ini terlihat dari jarak antara dosis 1 dengan dosis 2 yang lumayan jauh, serta jumlah yang telah melakukan vaksin belum mencapai 50% dari jumlah populasi masyarakat yang terdapat di Indonesia.

No	Bulan	Dosis 1	Dosis 2
1	Januari	0%	0%
2	February	1,3%	0%
3	Maret	2,64%	0%
4	April	6,2%	3,5%
5	Mei	6,8%	4%
6	Juni	10%	7%
7	Juli	20%	8%
8	Agustus	30%	17,4%
9	September	45,12%	25,34%

Table 1. Data Vaksinasi Dosis 1 dan Dosis 2

Dari data diatas dapat dilihat jumlah pemberian dosis vaksin mulai dari awal pemberian vaksin di Indonesia pada tanggal 13 januari sampai dengan tanggal 30 September 2021. Ini merupakan data pemberian vaksin setiap minggu (vaksin.kemkes.go.id).

Pemerintah melakukan kebijakan program vaksinasi ini dengan harapan dapat mencegah penularan yang tinggi. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah bersama dinas kesehatan mengupayakan ketersediaan vaksin yang nantinya akan dibagikan kepada masyarakat. Terdapat beberapa jenis vaksin yang akan digunakan oleh Indonesia, terdapat 5 jenis vaksin yakni AstraZeneca, Moderna, Sinovac, Pfizer dan Sinopharm (Kemenkes RI, 2020A). Kelima jenis vaksin ini memiliki kegunaan dan efek yang berbeda – beda, setelah melakukan uji lab yang telah dilakukan.

Jenis-jenis vaksin yang ada di Indonesia saat ini memiliki manfaat dan efek setelah nya. Pemerintah Pusat mengambil kebijakan untuk melakukan vaksin kepada masyarakat dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Pemerintah daerah dengan arahan dari pemerintahan pusat melakukan kebijakan yang telah disepakati. Ini dimaksudkan untuk mengurangi angka pelonjakan yang tinggi. Pemerintah Kabupaten Wonogiri menjadi salah satu daerah yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah ini melakukan beberapa hal guna untuk mengurangi angka penyebaran Covid 19 yang begitu tinggi. Mulai dari adanya pembatasan masyarakat, lalu pembatasan tempat-tempat umum serta menjaga jarak yang telah ada. Pemerintah daerah juga melakukan sosialisasi terhadap masyarakat akan pentingnya menjaga jarak dan memakai masker ini bertujuan agar tidak semakin luasnya penyebaran Covid 19 yang terjadi. Komunikasi

serta praktik yang dilakukan pemerintah dapat secara maksimal di tunjukan kepada masyarakat untuk merealisasikan dan tidak melonjaknya kasus Covid 19 yang ada.

Pemerintah Pusat yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah berupaya agar ketersediaan vaksin sampai kepada masyarakat. Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri mengambil kebijakan tentang vaksin. Hal ini dilakukan dalam upaya pemerintah Pusat untuk mengurangi lonjakan kasus yang tinggi. Kabupaten Wonogiri ini sendiri terletak di Provinsi Jawa Tengah, yang merupakan salah satu daerah yang memiliki jumlah penduduk yang begitu tinggi. Dengan jumlah penduduk yang tinggi, juga mengakibatkan angka kasus terkena Covid 19 yang sangat tinggi. Sebagai salah satu daerah yang memiliki tingkat kenaikan kasus yang begitu tinggi, Pemerintah Kabupaten Wonogiri mengambil tindakan dengan cepat akan masalah pelonjakan Covid 19 yang saat ini semakin tinggi.

Pemerintah Kabupaten Wonogiri mengambil tindakan dengan menerapkan kebijakan yaitu optimalisasi sumber daya manusia (SDM) bidang kesehatan dengan menggunakan ketersediaan anggaran biaya tak terduga (BTT). Ini dijelaskan bahwa optimalisasi SDM lintas instansi kesehatan terkait dengan mengonsolidasikan SDM yang ada. Dengan demikian, fungsi kewenangan yang ada berada pada satu frame kebijakan yang sama. Kebijakan yang telah diluncurkan tersebut diharapkan bisa mengurangi penyebaran Covid yang tinggi (Kompas.com).

Selain dengan menerapkan kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Wonogiri juga melaksanakan program vaksinasi bagi masyarakat. Program vaksinasi ini ditunjukan kepada tenaga medis, pelayan public serta masyarakat umum luas. Mulai dari tahap pemberian vaksin dari Pemerintah Kabupaten Wonogiri hingga masyarakat Desa. Program vaksin yang dilakukan pun dilaksanakan secara bertahap. Mulai dari memberikannya kepada lansia dari tingkat kota hingga tingkat desa. Sasaran yang

pertama dilakukan ialah kepada para lansia, sebelum melakukan pemberian vaksin ini Pemerintah Kabupaten Wonogiri melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya vaksin untuk ketahanan tubuh agar terhindar dari adanya terpaparnya kasus Covid 19. Komunikasi yang dilakukan pemerintah mulai dari sosialisasi di tiap pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit, Klinik dan juga Puskesmas. Ini dilakukan agar tenaga medis tidak salah memberikan info kepada masyarakat. Yang setelah itu dilanjutkan pemberian sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya vaksin untuk daya tahan tubuh.

Proses pemberian vaksin kepada masyarakat terbilang lamban karena mayoritas masyarakat yang masih susah dalam menerima sosialisasi akan vaksin serta banyak menerima berita hoax tentang vaksin, mulai dari bahaya dan dampaknya. Dari target yang telah disasar oleh pihak pelayanan kesehatan untuk desa-desa yang sudah terdaftar, hanya beberapa persen dari kuota yang telah disediakan untuk para lansia. Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam beberapa bulan terakhir mencoba untuk memberikan pelayanan vaksinasi yang saat ini digencarkan. Mulai dari sosialisasi dan peraturan yang diterapkan guna meratakan sistem vaksinasi yang ada. Akan tetapi dalam beberapa minggu terakhir ini Pemerintah Kabupaten Wonogiri mengalami kendala yakni karena jumlah SDM yang memberikan vaksin kepada masyarakat yang sedikit serta respon masyarakat yang masih banyak belum mendapatkan vaksin (Gatra.com).

Capaian pemberian vaksin yang berada di Kabupaten Wonogiri per tanggal 1 Agustus 2021 bisa dikatakan rendah atau baru mencapai 11,6% dari jumlah target yang diinginkan. Ini bisa dikatakan jauh dari target yang ingin dicapai dari jumlah penduduk sebanyak 855.663 masyarakat sampai saat ini baru tercapai sekitar 99.779 dari target yang telah ditentukan. Jumlah yang tertera ini masih terbagi dalam beberapa sector,

yakni Nakes, petugas pelayanan publik, masyarakat rentan atau lansia serta masyarakat umum termasuk remaja (Muhlis Al Alawi, KOMPAS.COM, 2021). Ini menandakan bahwa masyarakat yang belum mendapat vaksin serta arahan dari Pemerintah Daerah untuk mewajibkan vaksin belum seluruhnya diterima dan dilakukan oleh masyarakat. Kendati demikian Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Tim Kesehatan untuk melakukan vaksinasi secara cepat. Karena jumlah stok vaksin yang didatangkan oleh Pemerintah Pusat masih terbatas dan belum semua siap membuat proses vaksinasi menjadi lamban. Dengan jenis vaksin yang diberikan yaitu sinovac dan AstraZenca yang masih dalam proses untuk masuk di Pemerintah Daerah. Selain dalam hal lambannya proses Vaksinasi yang berada di Kabupaten Wonogiri ini, respond dan tindakan dari masyarakat yang terbilang masih susah untuk melakukan vaksin juga menjadi salah satu kendala dalam proses percepatan vaksin. Kesadaran dari masyarakat juga diperlukan dalam hal penerimaan vaksin untuk menjaga daya tahan tubuh.

Kecamatan Tirtomoyo merupakan salah satu daerah yang berada di Kabupaten Wonogiri yang mengalami masalah terkait lambannya vaksin Covid 19. Ini terlihat dari jumlah masyarakat yang belum semua mendapatkan vaksin, dari target yang telah disiapkan mulai dari lansia, orang produktif, dan remaja. Karena kurang yakin nya masyarakat akan vaksin Covid 19 dan juga mendapat simpang siur terhadap info vaksin. Sehingga masyarakat takut untuk melakukan vaksin. Kecamatan Tirtomoyo ini menjadi salah satu daerah dari beberapa kecamatan yang memang masih minimnya vaksin masuk kedaerah tersebut. Ini terlihat dari dari proses awal masuknya data masyarakat yang ingin melakukan vaksin. Dilihat dari data yang ada, daam rentan bulan januari sampai akhir September masyarakat yang melakukan vaksinasi di kecamatan Tirtomoyo masih berada di angka 35% atau masih belum menyentuh 50% dari masyarakat yang terdapat di kecamatan Tirtomoyo, dan ini masih berada di bawah dari

kecamatan lain seperti kecamatan wonogiri yang hampir menyentuh angka 75% dari jumlah masyarakat yang melakukan vaksinasi. Melihat dari data yang ada, masyarakat yang ingin vaksin di daerah tersebut masih jauh dari target yang ingin dicapai. Persoalan lambannya vaksin ini terjadi karena jumlah vaksin yang sudah disiapkan oleh tim kesehatan puskesmas masih terfokus untuk lansia, akan tetapi respon masyarakat yang kurang begitu mendapat informasi akan vaksin, sehingga terdapat beberapa tempat yang menyisakan kuota untuk vaksin. Sehingga terdapat banyak masyarakat yang belum melakukan vaksinasi.

Sehingga dalam proses percepatan vaksin dapat dilakukan dengan maksimal dan dapat secara merata di Kabupaten Wonogiri. Serta proses yang lamban dalam mengimplementasikannya kepada masyarakat, Peneliti dengan ini ingin lebih mengetahui dan juga ingin melihat bagaimana proses implementasi kebijakan program yang telah dilakukan pemerintah dalam pemerataan vaksinasi di Kabupaten Wonogiri. Ini terlihat dari perkembangan yang telah dilaksanakan selama proses pemberian vaksin. Maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai “Implementasi Program Pemerataan Vaksin Covid 19 Di Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan oleh penulis sebelumnya. Maka pertanyaan yang muncul dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi program vaksinasi Covid-19 yang saat ini terjadi di Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri?
2. Faktor faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi program vaksinasi Covid-19 yang saat ini terjadi di Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri?

1.3 Tujuan Masalah

1. Melihat dari rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana proses implementasi program pemerataan vaksinasi Covid-19 yang terjadi di Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri dalam mencegah pandemic covid 19.
2. Melihat apa saja faktor yang yang mempengaruhi proses implementasi program pemerataan vaksinasi Covid-19 yang ada di Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dapat menjadi salah satu model lain dari Kebijakan Publik yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri terkhususnya di Kecamatan Tirtomoyo. Harapan lain dari adanya penelitian ini ialah menjadi media pembelajaran dalam mata kuliah Kebijakan Publik di Program Studsfafdasddi Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Serta penulis berharap dapat menjadi pembanding dengan daerah lain dalam hal pengimplementasian kebijakan yang ada.

1.4.2 Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan memiliki manfaat yang baik kepada Pemerintah Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri serta dapat menjalankan kebijakan yang telah dilakukan dalam pemertataan proses penanganan kasus Covid 19 dengan program vaksinasi bagi masyarakat. Sehingga dapat terfokus dengan upaya Pemerintah dalam pemeratakan program vaksinasi secara maksimal dan menekan angka kasus Covid 19 yang tinggi. Serta dapat terciptanya masyarakat yang memiliki

daya tahan yang baik serta tidak terpapar Covid 19 dengan program Vaksinasi secara berkala dengan harapan dapat maksimal secara merata di Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri. Kajian Teori

1.5 Kajian Pustaka

Berikut akan dijelaskan beberapa tinjauan pustaka yang diambil dari hasil penelitian terdahulu. Kajian pustaka yang dijelaskan tentunya memiliki pembahasan yang berkaitan dengan latar belakang masalah pada penelitian ini. Beberapa tinjauan pustaka yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut :

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis	Judul	Hasil Temuan	Link Jurnal
1.	(Naelia Mutia Nasir, Ibnu Susanto Joyosemito, Baequni Boerman, Ismaniah, 2021)	Kebijakan Vaksinasi COVID-19: Pendekatan Pemodelan Matematika Dinamis Pada Efektivitas Dan Dampak Vaksin Di Indonesia	Dari penelitian ini menunjukkan bahwa program kebijakan vaksinasi yang dilakukan pemerintah ini diharap dapat menurunkan jumlah kasus Covid 19 yang belum terkendali. Terdapat lima jenis vaksin yaitu AzstraZeneca, Moderna, Sinovac, Pflzer dan Sinopharm. Serta langkah strategis yang dilakukan pemerintah dalam menjamin ketersediaan vaksin apapun itu jenisnya untuk mengakselerasi proses vaksinasi ke masyarakat dan mendorong partisipasi masyarakat untuk divaksin sesuai dengan target yang telah ditentukan.	<u>(PDF) Kebijakan Vaksinasi COVID-19: Pendekatan Pemodelan Matematika Dinamis Pada Efektivitas Dan Dampak Vaksin Di Indonesia (researchgate.net)</u>
2.	(Avicha Febriyanti, 2020)	ANALISIS PENGARUH DAMPAK COVID-19 DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh dampak covid-19 dan kebijakan pemerintah terhadap perekonomian pedagang sektor informal di	<u>(9) ANALISIS PENGARUH DAMPAK COVID19 DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP</u>

		PEREKONOMIAN PEDAGANG SEKTOR INFORMAL DI INDONESIA	Indonesia. Data yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah Data Sekunder, yang mana data ini diperoleh dari beberapa media di laman online yang memberikan informasi mengenai perekonomian yang terjadi saat pandemi covid-19 di indonesia yang di keluarkan oleh pemerintah. Terutama untuk para pedagang sektor informal yang presentase pendapatannya menurun akibat dari pandemi covid-19. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah seperti lockdown hingga diterapkannya PSBB dengan tujuan agar dapat mencegah rantai penyebaran pandemi covid-19.	<u>PEREKONOMIAN PEDAGANG SEKTOR INFORMAL DI INDONESIA Avicha Febriyanti - Academia.edu</u>
3.	(Darmin Tuwu, 2020)	KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19	Tulisan ini bertujuan untuk mengelaborasi bagaimana kebijakan pemerintah dalam mencegah dan menangani COVID-19. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Fokus studi adalah kebijakan pemerintah dan peristiwa yang mengikuti pasca implementasi kebijakan periode Maret sampai dengan Juni 2020 terkait kebijakan pemerintah dalam pencegahan dan penanganan COVID-19. Hasil studi menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah untuk mencegah penyebaran	<u>(PDF) KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 (researchgate.net)</u>

			<p>penularan virus Corona seperti: kebijakan berdiam diri di rumah; Pembatasan Sosial; Pembatasan Fisik; Penggunaan Alat Pelindung Diri; Menjaga Kebersihan Diri; Bekerja dan Belajar di rumah; Menunda semua kegiatan yang mengumpulkan orang banyak; Pembatasan Sosial Berskala Besar; hingga pemberlakuan kebijakan New Normal. Di samping itu, pemerintah juga telah mengimplementasikan kebijakan social assistance dan social protection untuk menjamin masyarakat bisa bertahan hidup, tidak hanya golongan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, tetapi juga golongan high class dalam masyarakat.</p>	
4.	(Anggia Valerisha, Marshall Adi Putra, 2020)	Pandemi Global COVID-19 dan Problematika Negara-Bangsa: Transparansi Data Sebagai Vaksin Socio-digital?	<p>Penelitian ini membahas masalah yang dihadapi oleh negara-bangsa terkait dengan transparansi data dan mengapa transparansi data dapat disebut sebagai 'vaksin sosio-digital' untuk mencegah penyebaran virus corona. Tulisan ini didasari pada argumentasi bahwa, meskipun data merupakan bagian dari spektrum digital, tetapi bagaimana pemerintah memperlakukan data, apakah itu transparan atau tidak, tetap memiliki dampak bagi aspek sosial dan politik terhadap bangsa dan Negara</p>	305104992.pdf (core.ac.uk)
5.	(Aprilia Santini, 2021)	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN NORMALISASI	<p>Penelitian ini membahas akan proses realisasi implementasi pada</p>	Implementasi Kebijakan Normalisasi Pada

		PADA SITUASI PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Pada Kegiatan Keagamaan Di Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah Surabaya)	kebijakan normalisasi di situasi pandemic covid 19. Kebijakan yang diterapkan oleh pondok pesantren as salafi al fitrah Surabaya dengan menerapkan kebijakan new normal serta melakukan protocol kesehatan yang ketat, seperti jaga jarak, memakai masker dan penyemprotan disinfektan pada area pondok. Akan tetapi dalam penerapannya di masyarakat mengalami hambatan, diantaranya ialah kurangnya kesadaran dari masyarakat akan penerapan protocol kesehatan, selain itu ialah minimnya sumber daya anggaran pondok pesantren daam melaksanakan protokol kesehatan disituasi pandemic Covid 19.	<u>Situasi Pandemi Covid-19: studi kasus pada kegiatan keagamaan di Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah Surabaya - Digilib UIN Sunan Ampel Surabaya (uinsby.ac.id)</u>
6.	(RB M. Akbar T. A. P., Diaz Virdani, Kiki Darma Kasih ,Lukman Arif, 2021)	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN VAKSINASI COVID-19 DI KOTA SURABAYA	Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui implementasi kebijakan vaksinasi Covid 19 yang dimana didalam nya ditemui beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam mengatasi penyebaran Covid 19. Sehingga dapat dilihat bahwa terdapat beberapa hal yang mempengaruhi dalam pelaksanaan vaksinasi ini sendiri.	<u>(PDF) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN VAKSINASI COVID-19 DI KOTA SURABAYA (researchgate.net)</u>
7.	(Arthemevia Indhawati, Putra Riyan Izzuddin, Muhammad Aulia Yahya, Susi Hardjati, 2021)	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OPERASI YUSTISI PROTOKOL KESEHATAN DI KABUPATEN SIDOARJO	Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan keefektifan Operasi Yustisi Masker kepada masyarakat dalam Rangka Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dan Menekan Penyebaran Wabah	<u>(PDF) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OPERASI YUSTISI PROTOKOL KESEHATAN DI KABUPATEN</u>

			COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian.	<u>SIDOARJO</u> (researchgate.net)
8.	(Nining Puji Astuti1, Erlangga Galih Zulva Nugroho, Joma Chyntia Lattu, Imelzy Riana Potempu, Dewi Anggiani Swandana, 2021)	PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENERIMAAN VAKSINASI COVID-19	Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap vaksin Covid 19. Ini dikarenakan kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pentingnya vaksin dalam mengurnagi penyebaran Covid 19.	<u>Data Publikasi Jurnal :: Sistem Informasi Penelitian - Universitas Kristen Satya Wacana</u> (uksw.edu)
9.	(Darmin Tuwu, 2020)	KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19	Penlitian ini bertujuan untuk menggabungkan kebijakan pemerintah dalam mencegah serta menangani Covid 19. Tujuan dari penelitian ini diantaranya ialah melihat hasil dari kebijakan yang telah ada, seperti menjaga jarak, berdiam diri didalam rumah, pembatasan social serta memakai masker.yang lebih penting ialah pemerintah menyiapkan skema kebijakan perlindungan social dalam sistem pelayan kesehatan yang ada.	(PDF) <u>KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19</u> (researchgate.net)
10.	(Elrizfa Deviona1, Fian Kanafi,, Ade Kusuma, 2021)	PEMBUATAN INFOGRAFIS SEBAGAI BENTUK SOSIALISASI VAKSINASI COVID-19	Dalam upaya memberikan sosialisasi vaksin ini menggunakan skema infografis yang menjadi salah satu media program vaksinasi Covid 19. Hal ini dilakukan untuk memberikan informasi yang diinginkan dan dibutuhkan masyarakat serta dapat mempertanggungjawabkan informasi yang ada.	<u>PEMBUATAN INFOGRAFIS SEBAGAI BENTUK SOSIALISASI VAKSINASI COVID-19 JABN</u> (upnjatim.ac.id)

			Melalui pembuatan infografis ini diharapkan dapat mengurangi keraguan akan masyarakat terhadap vaksinasi.	
--	--	--	---	--

Berdasarkan pada beberapa penelitian diatas, penulis lalu menarik kesimpulan bahwa focus dalam penelitian sebelumnya lebih mengarah akan implementasi kebijakan dalam proses program yang dilakukan oleh pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, serta pada penelitian kali ini focus lokasi penelitian dilakukan di daerah Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri. Adapun terkait dengan penelitian diatas, penulis melakukan hal yang berbeda dengan kebanyakan penelitian sebelumnya dengan melakukan kebaruan terkait Implementasi Program Pemerataan vaksinasi Covid-19 yang berada di daerah Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan Publik ini merupakan salah satu aktivitas dalam suatu proses kebijakan yang bersentuhan dengan kepentingan public serta dapat diterima oleh public. Dalam hal lain proses ini ditekankan untuk dapat hasil yang maksimal dalam perencanaan kebijakan, tetapi beda halnya jika tidak memperhatikan implementasi yang terjadi dilapangan. Ini berakibat akan penilaian dan evaluasi yang berjalan tidak sesuai harapan yang di inginkan.

Hakekat implementasi ini merupakan serangkaian kegiatan yang terencana dan bertahap yang akan dilakukan instansi pelaksana dengan didasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh otoritas wewenang, sebagaimana yang telah dirumuskan oleh Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabartier mengemukakan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar. Keputusan – keputusan itu mengidentifikasi masalah – masalah yang ingin dicapai dan berbagai

cara untuk menstruktur masalah – masalah yang ingin dicapai dan berbagai cara dalam menstrukturkan implementasinya. Proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang – undang kemudian output dari kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana dan akhirnya perbaikan – perbaikan penting terhadap undang – undang yang bersangkutan. Sehingga Gindle (dalam Wiyoto 2005:31) mengartikan arti dari implementasi kebijakan sebagai salah satu upaya untuk menciptakan keterkaitan yang memungkinkan tujuan kebijakan public dapat terwujud sebagai hasil dari aktivitas pemerintah.

Sesuai dengan proses implementasi kebijakan diatas maka salah satu peneliti Menurut Thomas R Dye (Wayne Parsons, 2005: xi hy) yang dikutip dari (Elwan, L.O.M, 2011:15). “public policy is whatever governments choose to do or not to do” kebijakan publik sebagai “apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan.dari kedua definisi ini Dye, merupakan suatu kebijakan public karena merupakan upaya dalam mencapai tujuan tertentu dan dapat diterima oleh masyarakat, sedangkan menurut Jones (1991) dalam La Ode Muhammad Elwan, (2011: 18) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan mudah dimengerti secara teoritik dan konseptual, namun tidak senantiasa demikian dalam bentuknya yang kongkrit, karena pelaksanaannya secara nyata bukanlah sesuatu yang mudah (Supriadin, Alam, & Elwan, 2020).

Menurut beberapa peneliti, mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai slaah satu aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Implementasi bukan hanya sekedar versangkut pada mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik yang bersangkut pada prosedur rutin yang melewati saran-saran birokrasi. Implementasi kebijakan adalah sesuatu yang penting dari pembuatan kebijakan.

Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa suatu rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak dapat diimplementasikan.

Model Implementasi Kebijakan Publik

a. Model Implementasi Kebijakan Merilee S Grindle

Model pendekatan implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Grindle dalam Agustino (2006:167) dikenal dengan *Implementasi as A Political and Administrative Process*. Menurut Grindle terdapat dua variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, yakni keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*) yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih, yang mana pengukuran keberhasilannya dapat dilihat dari dua hal:

- 1) Dilihat dari proses kebijakan itu terjadi, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
- 2) Apakah tujuan kebijakan sudah tercapai, yang mana dimensi ini diukur dengan dua faktor, yaitu :
 - (a) Efek yang terjadi pada masyarakat secara individu dan kelompok.
 - (b) Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi

Keberhasilan sebuah implementasi publik juga menurut Grindle ditentukan oleh tingkat implementasi kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas *Content of Policy dan Context of Policy* :

1. Content of Policy (isi kebijakan)

(a) *Interest Affected* (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi)

Interest Affected ini berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam suatu pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan.

(b) *Type of Benefits* (tipe manfaat)

Pada poin ini terdapat tipe manfaat berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

(c) *Extent of Change Envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai)

Setiap kebijakan memiliki target yang nantinya hendak dan ingin dicapai. Tipe manfaat yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa sejauh mana perubahan yang nantinya diinginkan dari sebuah kebijakan haruslah memiliki skala yang jelas.

(d) *Site of Decision Making* (letak pengambilan keputusan)

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.

(e) *Program Implementor* (pelaksana program)

Dalam menjalankan dan melaksanakan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan.

(f) *Resources Committed* (sumber-sumber daya yang digunakan)

Pelaksanaan sebuah kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

2. *Context of Policy* (lingkungan kebijakan)

(a) *Power, Interest and Strategi of Actor Involved* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat).

(b) *Imitation and Regime Characteristic* (karakteristik atau rejim yang berkuasa).

(c) *Compliance and Responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana).

b. Model implementasi kebijakan George C Edwards III

Model George C Edwards III memandang pelaksanaan kebijakan itu seperti sebuah proses dinamis, yang mana memiliki beraneka ragam faktor yang saling mempengaruhi sebuah pelaksanaan kebijakan. Dalam hal ini faktor-faktor yang penting dalam menjalankan proses kebijakan itu kedalam sebuah implementasi. Sehingga untuk melihat bagaimana sistem kebijakan itu terlaksana, George C Edwards III (1980) memaparkan dalam tulisannya

bahwa terdapat 4 (empat) faktor yang berperan dalam kesuksesan implementasi dalam kebijakan. Faktor ini meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi dan juga struktur birokrasi.

Sehingga dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Komunikasi : Komunikasi ini sendiri ialah proses penyampaian suatu kabar dalam sebuah komunikasi. Komunikasi kebijakan memiliki arti proses menyampaikan kabar kebijakan oleh pembentuk kebijakan ke pelaksana kebijakan. Sehingga dapat dijelaskan bahwa suatu komunikasi yang disampaikan oleh pemberi kepada pelaksana kebijakan harus seimbang dan tidak boleh salah, karena akan berdampak kepada hasil yang akan dilaksanakan. Komunikasi pada implementasi program kebijakan meliputi aspek pokok yakni informasi di transformasi (transmisi), informasi jelas (clarity) dan informasi konsisten (consistency). Aspek petransformasian dimaksudkan supaya kabar tak cuma diteruskan terhadap implementator program melainkan pada pihak terkait dan kelompok sasaran. Aspek kejelasan dimaksudkan supaya kabar mudah dimengerti dan jelas, kecuali guna mencegah kelirunya interpretasi oleh implementator kebijakan, target yang dituju ataupun golongan terpaut pada pelaksanaan program. Sebaliknya aspek konsistensi mengharapakan supaya kabar yang di sampaikan perlu konsistensi maka tidak timbul kekhawatiran bagi pelaksana kebijakan, target sasaran ataupun pihak terkait.
- b. Sumber Daya : Sumber Daya dalam implementasi suatu kebijakan memiliki peran kepada pelaksana kebijakan akan kejelasan konsistensi aturan dan ketentuan yang telah dibuat agar tersampaikan dalam aturan

kebijakan. Pelaksana kebijakan tidak akan sukses tanpa adanya support atau dukungan oleh sumber daya yang berkualitas dan berkuantitas agar dapat berjalan dengan baik.

- c. Disposisi : Perilaku dan karakter dari implementator program memiliki peran mewujudkan implementasi selaras target dan maksud kebijakan. Sehingga dalam perilaku kebijakan harus memiliki sifat komitmen dan ketulusan. Ini agar dapat difokuska pada tujuan kebijakan yang ada. Ketika pelaksanaan implementasi mempunyai perilaku yang baik sehingga dapat melaksanakan program dengan baik seperti yang diinginkan dari penyusun kebijakan. jikalau perilakunya mendukung sehingga pelaksanaan berjalan optimal.
- d. Struktur Birokrasi : Susunan pada birokrasi mempunyai dampak relevan terhadap pelaksanaan kebijakan. Didalam struktur birokrasi ini memiliki 2 hal yakni struktur semata dan prosedur. Prosedur merupakan hal yang pertama, karena akan berpengaruh kepada SOP dalam suatu kebijakan itu. Lalu yang kedua ialah susunan birokrasi dalam suatu proses yang dilakukan, ini meliputi pelayanan yang ada.

Dalam teori diatas dijelaskan tentang implementasi suatu kebijakan oleh Merilee S Grindle sebagai salah satu cara untuk melihat isi kebijakan apa yang nantinya digunakan dalam penelitian ini, serta teori George C Edwards III (1980) ini menjadi salah satu teori dalam mencari faktor apa saja yang nantinya akan berpengaruh dalam proses penelitian ini. Kedua teori diatas merupakan teori yang akan digunakan dalam penelitian ini karena mencakup beberapa aspek yang terdapat dalam “Implementasi Program Pemerataan Vaksinasi Covid 19 (Studi Kasus : Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri).

1.6.2 Program Vaksinasi Covid -19

Program vaksinasi Covid – 19 di Indonesia terjadi sejak 13 Januari 2021. Orang pertama yang melakukan vaksinasi di Indonesia ialah Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo yang kemudian di ikuti oleh sejumlah pejabat dan juga aparat Negara lainnya. Program ini dapat terlaksana setelah sebelumnya pada tanggal 11 Januari 2021 Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) mengeluarkan persetujuan penggunaan darurat yang diikuti fatwa halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia terhadap vaksin Covid – 19 yang diproduksi oleh Sinovac. Merujuk dari laman resmi Satuan Tugas Penanganan Covid – 19 di Indonesia, vaksinasi akan diadakan dalam dua tahap untuk setiap orang dengan estimasi jarak sekitar 14 hari setelah suntikan pertama. (Kemenkes, 21).

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mendefinisikan vaksinasi sebagai salah satu kegiatan yang sederhana, aman, dan efektif dalam melawan penyakit berbahaya sebelum penyakit itu masuk ke dalam tubuh. Kegiatan vaksin sebenarnya dilaksanakan untuk memasukkan vaksin kedalam tubuh. Vaksin yang ada berisi virus atau bakteri yang telah dilemahkan atau dibunuh sebelumnya, sehingga ketika telah disuntikan kedalam tubuh manusia nantinya akan bekerja sebagai sistem imun untuk membentuk anti bodi dan mengetahui bagaimana melawan virus asli yang telah ada. Vaksin ini dilakukan dengan beberapa cara diantaranya disuntikan ke dalam tubuh, dimasukkan ke dalam kulit atau disemprotkan melalui hidung (WHO, 2020).

WHO mengingatkan akan pentingnya melakukan vaksinasi diantaranya selain untuk melindungi diri sendiri, melainkan untuk melindungi orang-orang yang berada di sekitar kita. Karena tidak semua orang dapat menerima vaksin, terdapat beberapa orang seperti memiliki penyakit serius dan memiliki alergi tidak

diperbolehkan untuk vaksin. Masyarakat yang telah melakukan program vaksinasi, nantinya akan terbentuk “*heard imunity*” yaitu proteksi secara tidak langsung dari infeksi penyakit yang ada. Imun yang telah berada didalam tubuh akan berkembang di populasi komunitas di suatu orang yang tidak boleh divaksin memiliki kesempatan yang rendah untuk terinfeksi virus karena banyak tempatnya tinggal telah memiliki kekebalan melawan virus sehingga nantinya tidak menular ke yang lain.

1.7 Definisi Konseptual

1.7.1 Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan adalah salah satu proses dalam suatu kebijakan yang dijalankan dan tersusun sesuai konsep rencana, ide, model dan kebijakan itu sendiri serta nantinya akan dilaksanakan secara langsung dengan melihat rencana yang sesuai dan berjalan dengan baik.

1.7.2 Program Vaksinasi Covid-19

Program Vaksinasi Covid-19 adalah sebuah langkah yang dilakukan untuk melawan virus atau penyakit berbahaya yang akan masuk ke dalam tubuh, dan sebagai salah satu anti body yang baik didalam tubuh.

1.8 Definisi Operasional

Tabel 2. Definisi Operasional Menurut Merilee S Grindle dan George C Edward III

No.	Variabel	Indikator	Parameter
1.	Implementasi Kebijakan (Merilee S Grindle)	Interest Affected	i. Kepentingan – kepentingan yang mempengaruhi kebijakan.
		Type of Benefits	ii. Dampak positif yang dihasilkan dari implementasi kebijakan.
		Extent of Change Envision	iii. Target capaian iv. Skala perubahan yang dihasilkan dari implementasi kebijakan
		Site of Decision Making	v. Letak pengambilan keputusan

		Program Implementor	vi. Pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel
		Resources Committed	vii. Sumberdaya pendukung kebijakan.
2.	Faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan (George C Edward III)	Komunikasi	viii. Informasi ix. Kejelasan
		Sumber Daya	x. SDM yang ada xi. Pemasukan ekonomi
		Disposisi	xii. Karakter Masyarakat xiii. Sikap Respon Masyarakat
		Struktur Birokrasi	xiv. SOP xv. Fragmentasi birokrasi

1.9 Metode Penelitian

Penelitian ini secara spesifik menggunakan metode penelitian kualitatif. Namun dalam pengertiannya sendiri penelitian kualitatif menurut Denzin & Lincoln (2011: 3-4) dalam (Ridho Al-Hamdi et al., 2020) merupakan suatu upaya dalam melakukan penafsiran, interpretasi, dan rasionalisasi terhadap realitas kehidupan berdasarkan dengan yang diteliti oleh seorang peneliti. Menurut (Creswell, 2014) pendekatan studi kasus menempatkan peneliti untuk mampu mengungkap dengan cermat mengenai suatu proses, peristiwa, kegiatan, aktivitas, ataupun program sebagai upaya dari penelitian yang dijelankannya. Alasan menggunakan metode penelitian Kualitatif ini dikarenakan dengan metode kualitatif ini dapat mencari data secara luas, serta dapat mengeksplor berbagai hal terutama focus pada penelitian sehingga dapat mendapatkan data secara detail dan lebih luas.

1.9.1 Jenis Penelitian:

Jenis penelitian ini secara khusus menggunakan Kualitatif dengan model pendekatan deskriptif. Merupakan salah satu model penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis mau secara lisan danri informan yang didapat saat melakukan survey olah data yang

diamati. Dalam model penelitian ini tidak ada penambahan ataupun pengurangan yang diperoleh oleh data di lapangan, penelitian ini menggambarkan gejala, kondisi serta situasi secara asli tanpa adanya manipulasi ketika waktu terjun dilapangan. Tujuan dari penelitian ini ialah melukiskan variable atau kondisi obyek yang diamati secara apa adanya atau asli tanpa adanya manipulasi.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti secara khusus menggunakan jenis serta pendekatan penelitian deskriptif kualitatif untuk mencapai tujuan dalam membuat deskriptif, gambaran umum, serta sistematis penulisan yang lebih terarah dan terstruktur.

Dengan merujuk serta mempertimbangkan beberapa hal, :

Pertama, penelitian kualitatif ini menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan di kehidupan sehari-hari.

Kedua, penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif, baik berupa fenomena yang dikategorikan ataupun dalam bentuk lainnya, seperti : foto, dokumentasi dan data serta catatan yang telah didapat lapangan saat penelitian.

Ketiga, penulis tidak mengambil jarak dengan yang telah diteliti, sebab hubungan yang telah dibangun didasarkan akan kepercayaan yang telah dilakukan secara intensif.

1.9.2 Lokasi Penelitian

Peneliti melaksanakan penelitiannya di Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri. Tepat nya melalui Dinas Kesehatan dan Pelayanan

Kesehatan yang bertujuan untuk mengumpulkan data terkait kebijakan program vaksinasi Covid 19 secara merta yang dilakukan oleh Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri. Lokasi ini dipilih penulis karena Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu kecamatan yang dalam proses vaksinasi Covid – 19 pelaksanaannya terbilang lambat dan masih banyak masyarakat yang belum memahami benar terkait manfaat dari program vaksinasi.

1.9.3 Jenis Data

1.9.3.1 Data Primer

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan ialah data primer. Adapun data primer yang digunakan ialah wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas, dan Masyarakat yang sudah divaksin. Data primer yang digunakan ini didapatkan dengan mewawancarai dan terjun langsung ke lapangan, dengan tujuan untuk mendapat data secara akurat dari pemerintah Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri. Dengan maksud ingin lebih mendalami bagaimana proses pemberian vaksinasi dari pusat sampai ke daerah.

1.9.3.2 Data Sekunder

Dalam penelitian jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Adapun data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber seperti buku, jurnal, arsip, maupun melalui internet yang memiliki keterkaitan dengan dengan pokok penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan dari dokumen seperti jurnal yang terkait dengan analisis kebijakan dan implementasi kebijakan yang dijalankan oleh Pemerintah Kecamatan Tirtomyo, Kabupaten Wonogiri, serta beberapa media yang

diberitakan tentang program pemerataan vaksinasi di daerah dalam penanganan pandemi covid-19.

1.9.4 Teknik Pengumpulan Data

1.9.4.1 Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara langsung dengan pimpinan dan karyawan tentang objek observasi yang sedang diteliti ini menggunakan wawancara tidak terstruktur, menurut (Sugiyono, 2008). Wawancara tidak terstruktur ini ialah wawancara yang bebas menggunakan model wawancara yang telah tersusun dan lengkap dalam pengumpulannya. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa tokoh yang akan diwawancarai terkait focus dalam penelitian. Terdapat 5 orang yang akan diwawancarai yakni, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri, Kepala Puskesmas Kecamatan Tirtomoyo, Kepala Kecamatan yang terdapat didaerah tersebut, Vaksinator yang melakukan vaksin, Masyarakat yang telah melakukan Vaksinasi. Dari beberapa tokoh dan sumber yang akan di wawancarai ini sumber data dapat diolah dan didapatkan.

Informan	Jabatan	Nama	Posisi
Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri	Dr. Setyowati	Kepala Bidang Penanganan Covid
Puskesmas Kecamatan Tirtomoyo	Kepala Puskesmas Kecamatan Tirtomoyo	Dr. Alba	Kepala Puskesmas
Pemerintah Kecamatan	Kepala Kecamatan Tirtomoyo	Catur Susilo Prono, S. Sos., M.AP	Sekretaris Kecamatan
Pelaksana Program Vaksinasi	Vaksinator yang melakukan program vaksinasi	Bu Fero	Tenaga Kesehatan
Masyarakat Penerima Vaksin	2 orang masyarakat yang melakukan program vaksinasi	Niko dan Fitria	Mayarakat

Masyarakat yang belum melakukan Vaksinasi	2 Orang yang belum melakukan program Vaksinasi	Warji dan Sugiman	Masyarakat
---	--	-------------------	------------

1.9.4.2 Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam pengumpulan data berupa datang langsung dan secara langsung melihat ke lapangan kemudian dicatat secara sistematis terkait subyek dan obyek yang telah diamati. Dalam hal ini untuk sistematika penulisan dilakukan melalui pengamatan di lokasi yang dituju. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengobservasi terkait proses implementasi program vaksinasi yang terjadi di daerah Kecamatan Tirtomoyo dari kesiapan hingga terealisasinya kepada masyarakat yang ada disana. Ini dilihat dari kesiapan tim kesehatan dalam melakukan vaksinasi di masyarakat. Dalam pelaksanaan observasi ini, ingin melakukan pengamatan secara langsung dengan waktu pengambilan data 2 minggu sekali, dan secara langsung dalam proses pengamatan ketika dilapangan tentang proses kegiatan yang ada.

1.9.4.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu cara untuk mencari data berupa catatan, buku, surat kabar, majalah dsb (Arikunto, 2006). Dalam penelitian ini menggunakan data-data yang dibutuhkan dan berhubungan dengan karyawan melalui dokumen-dokumen serta catatan yang ada. Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan sumber data seperti foto, sumber data, dokumen atau catata dari lembaga yang terkait dari obyek yang diwawancarai, sumber data dari dinas dan puskesmas yang bersangkutan. Serta dokumentasi yang diambil selama olah data yang telah dilakukan.

1.9.5 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu kegiatan penelitian yang berupa proses penyusunan dan pengelolaan data yang menggunakan penafsiran data dan telah diperoleh. Menurut salah satu peneliti Sugiyono (2015) yang dimaksud dengan analisis data ialah, “Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden/sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diujikan.” Analisis data yang digunakan ini bertujuan untuk menjawab semua pertanyaan yang tercantum dalam identifikasi masalah.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan teknis Triangulasi. Teknik triangulasi data, yaitu suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu (Moleong, 2006). Guna memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan maka dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi data, yaitu berdasar sumber, penyidikan, berdasar teori tertentu dan metode (Moleong, 2006). Kegiatan teknik analisis data yang ada meliputi, pengumpulan data, reduksi data dan penyajian data yang telah didapatkan waktu olahdata di lapangan.

a. Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data ini merupakan tahap yang dimana penulis memasukkan data yang telah didapat berupa narasi atau kata-kata yang didapatkan dari sumber data dan informasi lalu nantinya digabungkan menjadi satu dalam tulisan.

b. Reduksi data

Reduksi data disini diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian hingga penyederhanaan, pengabstraksian dan informasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis saat dilapangan. Kegiatan reduksi data ini dilakukan secara terus menerus selama pengumpulan data. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi yakni membuat ringkasan, menelusuri tema, menulis memo.

Reduksi data ini sendiri merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan dan mengarahkan kepada sumber data lalu mengorganisasi data sedemikian rupa hingga tahap pembuatan kesimpulan akhir. reduksi data ini akan berlanjut terus sampai ke tahap laporan akhir yang sudah tersusun lengkap.

c. Penyajian Data

Langkah selanjutnya setelah reduksi data ialah ke tahap penyajian data. Penyajian data sendiri adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.

Langkah ini dilakukan peneliti untuk menyajikan sekumpulan informasi yang telah tersusun dan memungkinkan adanya penarikan kesimpulan. Alasan dilakukannya penyajian data ini ialah untuk memperoleh data dalam penelitian kualitatif yang berbentuk narasi sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.

d. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir dalam proses analisis data adalah penarikan kesimpulan yang ditandai dengan penarikan data yang telah ditampilkan sejauh pemahaman dan interpretasi peneliti. Pada tahap ini penelitian ini mengutarakan kesimpulan dari

data-data yang telah diperoleh selama penelitian berlanjut dilapangan. Pemeriksaan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan kevalidan data yang memanfaatkan sesuatu dari luar data itu sendiri serta nantinya memerlukan pengecekan sebagai data pembanding data tersebut.